

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

BUKU

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan,2008),hlm.74¹

Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia dari Ajaran Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 8

Hasan Basri Nata Menggala Dan Sarjita, Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah, (Jogjakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005). h.27 & 35- 37

Lilik Mulyadi, 2010, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120

Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

Mujahid A. Latief, 2007, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II), Jakarta: Komisi hukum Nasional RI, hlm. 283

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Peneitian Hukum, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, h. 35.

Sarjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 163

Siswanto Sunarso, 2015, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 264

Sri Mamuji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Yoelianto Sudayat, "Pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 298/B/2013/PT-TUN.JKT)," Jurnal Selisik (Vol. 2, No. 4, Desember 2016): 106-107

Website

Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen, melalui <https://alisafaat.wordpress.com> ----- diakses tanggal 10 April 2021

